



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUTRISNO**
2. Jabatan : **KEPALA SMPN 1 PAMOTAN**
3. NHK : **796954**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.555.000.000

1. Tanah Seluas 1030 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA PATI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 650 m2 di KAB / KOTA PATI, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. Tanah Seluas 196 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1239 m2/60 m2 di KAB / KOTA REMBANG, WARISAN Rp. 1.250.000.000
6. Tanah Seluas 2881 m2 di KAB / KOTA REMBANG, WARISAN Rp. 600.000.000
7. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
8. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA REMBANG, WARISAN Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 200.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000



3. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	
9.500.000		
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	
7.000.000		
5. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2007, HASIL SENDIRI	Rp.	
85.000.000		
6. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	
80.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	105.708.411
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.861.208.411
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.861.208.411

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.